

## BAB II

### ISLAM DAN ADAT MASYARAKAT MINANGKABAU

#### A. Sosio-kultural Masyarakat Minangkabau

Bicara mengenai Minangkabau bukan berarti menunjukkan kefanatikan terhadap satu suku, melainkan membahas mengenai salah etnis yang beragam di Nusantara, serta membicarakan salah satu corak budaya dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an budaya Nusantara. Secara umum ketika mendengar kata Minangkabau, *mindset* masyarakat pasti akan tertuju kepada provinsi Sumatera Barat. Padahal hakikatnya Sumatera Barat adalah daerah administratif pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Minangkabau adalah territorial kebudayaan yang luasnya melebihi dari provinsi Sumatera Barat.<sup>12</sup>

Ketika ingin memahami kondisi sosial yang berkembang di Minangkabau, secara tidak langsung mewajibkan kita untuk mempelajari serta memahami falsafah yang berkembang di Alam Minangkabau. Ada dua kunci yang menjelaskan tentang falsafah yang berkembang di Minangkabau yakni *sintesa* dan *anti-tesa*. Falsafah alam Minangkabau terbentuk dari pertentangan dan pembaharuan di masyarakatnya. Dalam masyarakat Minangkabau, *sintesa* dan *anti-tesa* tidak dibiarkan berkembang sebagai penyebab kehancuran

---

<sup>12</sup> I. H. Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Remaja Karya, 1994), 18.

sistem sosial secara keseluruhan tapi di-*manage* untuk membentuk suatu falsafah baru.<sup>13</sup>

Falsafah dasar adalah alam Minangkabau adalah *Alam Takambang Jadi Guru*, jadi pada *sintesa* dan *anti-tesa* paling dasar adalah pertentangan empat unsur alam yang dikenal dengan *Nan Ampek*<sup>14</sup> yaitu ada matahari, dan bumi, bulan dan bintang. Ada siang dan malam, ada pagi dan petang, ada Timur ada Barat, ada Utara ada Selatan. Ada mendatar ada melereng, ada mendaki ada menurun. Semuanya saling berbenturan namun tidak menghancurkan, saling berhubungan namun tidak saling mengikat, semuanya ada dengan perannya masing-masing.

Secara mudahnya, konsep antara *Sintesa* dan *Anti-Tesa* ini telah menyatu dalam posisi individu serta hubungannya dengan statusnya dalam masyarakat. Adat Minangkabau menempatkan bahwa semua individu itu memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat, namun dengan fungsi yang berbeda, hal ini tertuang dalam falsafah lainnya yang berbunyi:

*Barek samo dipikua*, (Berat sama dipikul)

*Ringan samo dijinjing*, (Ringan sama dijinjing)

*Ka bukit samo mandaki*, (ke bukit sama-sama mendaki)

*Ka lurah samo manurun*, (ke lurah sama-sama menurun)

---

<sup>13</sup>M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), 146.

<sup>14</sup>*Ibid*, 148.

*Nan ado samo dimakan,*(yang ada sama-sama dimakan)

*Nan indak samo dicari,*(yang tidak ada sama-sama dicari)

*Saciok bak ayam,*(seciap umpama ayam)

*Sadancian bak basi,*(berdencing umpama besi)

*Malompek samo patah,* (Melompat sama-sama patah)

*Manyaruduak samo bungkuak,*(menyeruduk sama-sama bungkok)

*Tatilungkuik samo makan tanah,* (tertulungkup sama-sama makan tanah)

*Tatilantang samo minum ambun,*(tertelentang sama-sama mimum embun)

*Tabanam samo basah,*(terendam sama-sama basah)

*tarapuang samo anyuik,*(terapung sama-sama hanyut)

*Kaluak paku kacang balimbiang,*(gulai paku kacang belimbing)

*Tampuaruang lengganglenggokkan,*(tempurung lengang-lenggokkan)

*Baok manurun ka saruaso,*(bawa menurun ke Saruaso)

*Tanamlah siriah di ureknyo,*(tanamlah sirih diuratnya)

*Anak dipangku kamanakan dibimbiang,*(anak dipangku kemenekan  
dibimbing)

*Urang kampuang nan dipatenggangkan,*(orang kampung dipertenggangkan)

*Tenggang nagari jan binaso,*(tenggang negeri jangan sampai binasa)

*Tenggang nan sarato jo adatnya,*(tengganglah beserta adatnya)

*Nan bungkuak ka tangkai bajak,*(yang bungkok jadikan tangkai bajak)

*Nan luruih ka tangkai sapu,*(yang lurus jadikan tangkai sapu)

*Satampuak ka papan tuai,*(setempa untuk papan tuai)

*Nan ketek ka pasak suntiang,*(yang kecil jadikan pasak suntang)

*Panarahan ka kayu api,*(yang tidak terpakai dijadikan kayu api)

*Abunyo ka pupuak padi,*(abunya jadikan pupuk padi)

*Nan buto pahambuih lasuang,*(yang buta peniup lesung)

*Nan pakak palatuih badia,*(yang tuli peletus meriam)

*Nan lumpuah panghuni rumah,* (yang lumpuh penghuni rumah)

*Nan patah pangajuik ayam,*(yang patah pengejut ayam)

*Nan binguang disuruah-suruah,*(yang bodoh untuk disuruh-suruh)

*Nan pandai tampek baiyo,* (yang pandai tempat beertukar pikiran)

*Nan kayo tampek batenggang,* (yang kaya tempat bertenggang)

*Duduak surang-surang basampik-sampik,* (duduk sendiri bersempit-sempit)

*Duduak basamo balapang-lapang,* (duduk bersama dilapang-lapangan)

*Kato surang dibulati,* (kata sendiri dibulakan)

*Kato basamo dipaiyokan,* (kata bersama dimufakatkan)<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan, dalam kehidupan sosialnya masyarakat Minangkabau menganut sistem komunal dimana individu menjadi bagian dalam masyarakat dan komunitasnya. Dalam sistem ini individu merupakan milik masyarakat, dan masyarakat adalah milik bersama individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Atas dasar hubungan timbal balik ini, berkembanglah falsafah *gadang dek diamba, tinggi dek dianjuang* (besar

---

<sup>15</sup>I. H. Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat*, 75-77.

karena didukung, tinggi karena diangkat) yang berarti setiap individu yang ada dalam masyarakat minangkabau didorong, dimotivasi untuk menjadi sosok yang berguna.

Walaupun kehidupan individu masyarakat Minangkabau diatur oleh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, bukan berarti individu tidak memiliki kebebasan otonomi sama sekali dalam menentukan nasibnya, tapi juga tidak memberi kebebasan total bagi individu yang menempatkan individu sebagai segala-galanya dalam tatanan masyarakat. Dalam tatanan masyarakat Minangkabau, adanya pengakuan hak dasar dari eksistensi seorang individu dalam mengekspresikan dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, namun juga harus menyadari bahwa kebebasan tersebut berkaitan erat dengan hak orang lain.<sup>16</sup> Aplikasi dari konsep individu dalam tatanan masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari kepemilikan harta, masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan *Matrilineal*-nya tidak mengenal yang namanya harta atas nama pribadi, kepemilikan harta pusaka hanya dimiliki oleh kaum, suku dan nagari.

Sistem kekerabatan *Matrilineal* ini menimbulkan suatu tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Minangkabau, yakni merantau. Penyebabnya adalah kurang jelasnya posisi dan fungsi laki-laki dalam struktur masyarakat Minangkabau. Pola migrasi merantau ini dapat juga diartikan

---

<sup>16</sup>M. Nasroen, *Dasar Falsafah*, 127.

sebagai penyaluran sumber daya manusia yang berlimpah di Minangkabau. Merantau, dalam budaya Minangkabau sudah seperti sebuah kewajiban, hingga tertuang dalam suatu petuah: “*Karakatau madang di hulu, Babuah bangungo balun. Karantau Bujang dahulu, dirumah paguno balun* (Karakatau madang dihulu, berbuah berbunga belum. Ke rantau bujang dahulu, dirumah berguna belum).

Bagi pemuda Minangkabau daerah rantau seolah menjadi *secondary hometown* bagi mereka, sedangkan Minangkabau adalah *Main Hometown*. Belajar dan bekerja merupakan aktivitas utama para perantau Minangkabau. Aktivitas ini tidak hanya melatih perantau untuk mencari nafkah dan bertahan hidup di perantauan, namun juga sebagai sarana untuk memperkaya khazanah budaya alam Minangkabau. Budaya merantau ini jugalah yang membawa banyak perubahan dalam wajah adat dan budaya Minangkabau. Pengalaman di perantauan menjadi tolok ukur kematangan seorang perantau Minangkabau ketika kembali ke kampung halaman. Pulang tanpa *buah tangan* (ilmu atau kekayaan) dianggap sebagai pulang *Langkitang* (siput) maksudnya perjalanan dan pengalamannya di perantauan tidak ada gunanya dan tidak membawa dampak terhadap kampung halaman.

## B. Politik dan Ekonomi Masyarakat Minangkabau

Perjuangan Paderi pada tahun 1811-1833 berdampak panjang terhadap kondisi politik di ranah Minangkabau. Konflik yang semula hanya terjadi karena persaingan pengaruh antara aristokrat adat dan elit ulama berubah menjadi konflik segitiga antara aristokrat adat, elit ulama dan pemerintah kolonial. Hal ini berujung redupnya pengaruh aristokrat adat dan elit ulama digantikan oleh pemerintah kolonial. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian “plakat panjang”. Pihak pemerintah kolonial mulai menerapkan kebijakan tanam paksa, menarik pajak dari masyarakat Minangkabau, mengganti lembaga adat sebagai lembaga pengadilan dengan lembaga peradilan Belanda. Sedangkan aristokrat adat hanya dianggap sebagai kaki tangan pemerintah dengan diberikan jabatan dalam tatanan pemerintahan.<sup>17</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial, Minangkabau berstatus sebagai wilayah kerassidenan yaitu *Residentie Sumatera's Westkust*.<sup>18</sup> pemerintahan administratif terbagi menjadi dua daerah yaitu *pertama*, kerassidenan Padang Barat yang berkedudukan di Bukittinggi, meliputi daerah darek (daerah pedalaman Minangkabau). *Kedua*, kerassidenan Padang Pesisir yang meliputi daerah Pasisia (daerah pesisir Pantai). Administrasi daerah diatur oleh seorang *kontroleur* yang diangkat oleh kepala kerassidenan atas nama gubernur

---

<sup>17</sup> Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 19.

<sup>18</sup> Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 27.

jenderal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *kontroleur* dibantu oleh pemimpin administrasi masyarakat Minangkabau yang disebut *laras* atau *Kapalo Nagari*.

Ada beberapa kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan di ranah Minangkabau, salah satunya adalah politik etis.<sup>19</sup> Politik ini dilaksanakan pemerintah dengan membauat *irigasi* untuk menunjang pertanian yang ada. Kebijakan adalah kebijakan *imigrasi* dengan cara memberi kesempatan untuk masyarakat Minangkabau dapat memilih antara bekerja di perkebunan pemerintah ataupun bekerja di instansi pemerintahan. Kebijakan lain adalah *edukasi* yang mulai diterapkan pada akhir abad ke-XIX.

Kebijakan politik *etis* ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat Minangkabau yang mayoritas merupakan petani *subsisten*.<sup>20</sup> Keadaan ini kemudian berubah ketika pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman ekspor seperti, rempah-rempah, teh, kopi, karet dan tebu. Dengan adanya pasar internasional masyarakat Minangkabau mulai beralih menjadi tanaman-tanaman ekspor tersebut, terutama kopi. Perkebunan yang besar mulai banyak dijumpai, seperti di daerah, Muaro Labuah, Batipuah, dan

---

<sup>19</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 15-17.

<sup>20</sup> Petani *Subsisten* adalah petani yang membudidayakan bahan pangan dengan jumlah yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga. Pertanian ini berciri memiliki variasi tanaman dan hewan ternak untuk konsumsi pribadi (*self-sufficiency*), terkadang ada bebrapa tanaman untuk pakaian dan bangunan. Meskipun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak jarang mereka juga memperdagangkan hasil bumi mereka.

Lubuak Sikapiang. Pengenalan sistem ekonomi dan pajak uang yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial juga memiliki peran dalam perubahan ekonomi masyarakat Minangkabau ini.

Setelah tanam paksa dihapuskan, masyarakat Minangkabau mengambil alih perkebunan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produksi komoditas ekspor tersebut. Perubahan yang signifikan pun terlihat, produksi padi wilayah Sumatera Barat turun drastis, sedangkan produksi komoditas ekspor meningkat tajam. Perubahan orientasi ekonomi masyarakat Minangkabau terlihat jelas pada masa ini, dari petani *subsisten* yang tidak memperdulikan uang, menjadi petani dengan orientasi keuntungan.

### **C. Pendidikan Masyarakat Minangkabau**

Secara umum pendidikan di Minangkabau terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama adalah pendidikan tradisional atau yang dikenal pendidikan Surau. Generasi selanjutnya adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, sekolah ini mengadopsi sistem pendidikan yang berkembang di Barat. Sekolah kolonial inilah yang kemudian menginspirasi tokoh-tokoh pemuda untuk mendirikan madrasah yang menyatukan antara

sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial.<sup>21</sup>

a. Sekolah Tradisional

Lembaga pendidikan Islam di Minangkabau dimulai ketika Islam mulai masuk di ranah Minang. Sebab ketika suatu agama mulai memasuki suatu daerah, diperlukan lembaga yang mengajarkan mengenai agama tersebut beserta praktek-prakteknya. Kebutuhan akan pengajaran ini bisa terpenuhi melalui lembaga-lembaga seperti Surau (langgar) dimana seseorang bisa mempelajari doktrin Islam sekaligus mempelajari praktek ibadahnya.

Minangkabau memiliki tradisi *ka Surau*, dimana seorang anak laki-laki yang sudah mencapai usia 12 tahun dianggap tidak memiliki kamar lagi di rumah ibunya. Karenanya fungsi Surau di Minangkabau menjadi lebih penting di ranah Minangkabau daripada daerah lain di Indonesia. Seorang anak laki-laki akan dikirim ke Surau untuk belajar agama di sore hari dan kemudian bermalam disana untuk mendalami ilmu-ilmu lainnya. Terkadang dalam satu surau bisa terdapat ratusan anak laki-laki yang belajar mengaji, pokok-pokok ajaran Islam, tatacara ibadah, *qasidah*, *barzanji* (riwayat hidup Nabi yang diceritakan ketika

---

<sup>21</sup> Murni Djamal, *Dr. H. Abdul Karim Amrullah; Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta:INIS, 2002), 51.

memperingati kelahirannya). Lembaga pendidikan islam ini dikenal dengan sekolah mengaji al Quran.<sup>22</sup>

Menurut tradisi madrasah, falsafah “Alam Minangkabau” merepresentasikan kumpulan nilai-nilai religious, seperti *fiqh* (hukum), *tauhid* (teologi), serta *tasawuf* (mistik). Karena sudah menjadi hal yang umum pada masa ini jika seseorang pemuda berpindah-pindah madrasah. Pada masa ini tercatat ada kurang lebih 15 madrasah dengan murid yang mencapai jumlah 1000 orang.<sup>23</sup>

#### b. Sekolah Kolonial

Institusi pendidikan yang mula-mula didirikan oleh pemerintah adalah institusi pendidikan rendah seperti *Volksschool* (sekolah rakyat), *Vervogschool* dan lainnya.<sup>24</sup> Alasan pemerintah mendirikan sekolah ini adalah desakan dari kaum liberal yang memenangkan pemilu di parlemen Belanda pada awal 1900-an. Dengan didirikannya sekolah-sekolah ini akan membantu untuk memberantas buta huruf. Selain itu diharapkan dengan adanya sekolah ini pemerintah berusaha untuk tidak memihak pada salah satu bentuk kepercayaan. Pendidikan yang ditampilkan tidak harus *synchron* dengan keadaan masyarakat, sebab diharapkan sekolah-sekolah ini nantinya akan mencetak *civitas academica* yang akan bekerja

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 30.

<sup>23</sup> Murni Djamal, *Dr. H. Abdul Karim*, 53.

<sup>24</sup> Marjani Martamim, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat* (Padang: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980), 68.



Ulama Minangkabau pertama yang tercatat melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di tanah haram adalah Syekh Abdullah Halaban yang berangkat pada tahun 1865. Syekh Abdullah Halaban bermukim di tanah suci selama 5 tahun sebelum akhirnya kembali ke kampungnya di Halaban Kab. 50 kota. Di sini Syekh Abdullah Halaban membuka surau dan mengajarkan ilmunya. Syekh Abdullah Halaban dikenal sebagai ulama yang “wajib” diikuti halaqahnya bagi ulama-ulama Minangkabau sebelum berangkat ke tanah suci. Selain Syekh Abdullah Halaban, ulama Minangkabau yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib sendiri berangkat saat berusia 11 tahun ke tanah Suci pada tahun 1871 dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.<sup>27</sup>

Banyak kalangan ulama-ulama besar Indonesia yang datang untuk belajar ke pusat Islam ini dikader langsung oleh Ahmad Khatib sendiri. Kepulangan murid-murid Ahmad Khatib ke Indonesia inilah yang dikemudian hari memberi kontribusi yang besar bagi pembaharuan keagamaan tahap kedua serta tumbuhnya pemikiran nasional kebangsaan yang sekaligus menjadi pemantik munculnya perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia pada awal abad ke-20.

Munculnya generasi baru tokoh intelektual muslim di Minangkabau pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 ini mampu menjadi penyeimbang aksi politik etis Belanda yang telah memperluas

---

<sup>27</sup>Irhash A. Shamad, *“Islam dan Praksisi Kultural*, 95.

jalur pendidikan barat bagi masyarakat pribumi. Surau-surau yang menjadi sentra pendidikan anak nagari di Minangkabau pun memperoleh nafas baru untuk bangkit bersaing dengan institusi yang dibangun oleh Belanda. Kemunculan kembali surau ini tentunya dengan pembaharuan yang mengadaptasi beberapa sistem pendidikan pemerintah Belanda. Pembaharuan pendidikan ini kelak membawa perubahan yang besar dampaknya bagi wajah budaya dan adat Minangkabau.

c. Sekolah reformis

Sekolah ini muncul atas prakarsa murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawy al Jawy. Tokoh-tokoh ini menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi selanjutnya. Pembaharuan dan gagasan apapun akan menjadi semu ketika tidak ada yang melanjutkan hal tersebut. Salah satu cara untuk menjaga agar pembaharuan dan gagasan itu tetap hidup salah satunya adalah melalui sarana pendidikan. Selain itu tuntutan masyarakat atas pendidikan yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah kolonial menjadikan gagasan untuk mendirikan sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan pemerintah namun tetap mengajarkan nilai-nilai agama menjadi suatu keharusan.

Sebut saja pada tahun 1915 Zainuddin Labai el-Yunusi membuat suatu inovasi yang berbeda dengan sistem pendidikan tradisional yang umum pada masa itu. Dalam sistem pendidikan yang dikenalkan oleh Labai, murid-murid belajar dengan menggunakan sistem kurikulum dan

kelas dengan kursi dan meja didalamnya. Sebelumnya pada tahun 1909 ada sekolah *Adabiyah* di kota Padang yang didirikan oleh Dr. H. Abdullah Ahmad. Walaupun pada awalnya sekolah ini mampu menjadi barometer pendidikan Islam modern, sejak mendapat subsidi dari pemerintah kolonial, sekolah ini mulai kehilangan arah dari tujuan awalnya. Ada juga Sumatera Thawalib yang dulunya merupakan Surau Jembatan Besi yang mengalami modernisasi ketika Dr. Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah mengajar disana. Perkembangan dan modernisasi dalam masyarakat turut andil dalam membantu sekolah-sekolah yang didirikan oleh reformis ini untuk terus berkembang dan banyak mencetak tokoh-tokoh nasional di kemudian hari.